

Apakah anak
bahagia?
are you happy?

Saya sudah bahagia

IYA. ALHAMDULILAH
Bahagia

Alhamdulillah
Bahagia.

ada sih
rasa yg kadang suka
khawatir.
+ ap? beliausia

Saya sudah
Bahagi

Iya, karna
Sekarang sudah
normal kembali

Alhamdulillah
saya bahagia 😊

Gak Bahagia. =

Alhamdulillah

ona saya suda
bertemu lagi
dengan kakak
smeru.

Sudah.

Bahagia cuman
masih ada yang
ga keburu hmm.

~~SAYA~~
SAYA UDAH
BAHAGIA

Saya Bahagia

Karena Bayak

MENDORONG PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS PERSPEKTIF ANAK UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI JAWA BARAT

Ulfah Alifia, Made Anthony Iswara, R. Ricky Firmansyah

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Indonesia perlu terus memperkuat komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk mendengarkan suara mereka dalam perumusan kebijakan. Pengukuran *kesejahteraan subjektif anak* merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia yang mempertimbangkan perspektif anak dalam melihat kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Pada 2017, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan UNICEF dalam kerja sama dengan Universitas Islam Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan Survei Kebahagiaan Anak di Jawa Barat. Meskipun secara umum anak-anak menunjukkan bahwa mereka merasa bahagia, terdapat lebih dari 200.000 anak yang merasa sangat tidak bahagia. Dengan visi "Jabar Juara", Pemprov Jabar berupaya meningkatkan kebahagiaan anak melalui berbagai program dan target. Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) dan keterlibatannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) diharapkan dapat mewadahi suara anak dalam perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi, penelitian SMERU menemukan bahwa pendapat dan aspirasi anak sering kali tidak didengarkan dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagai masukan untuk perbaikan, catatan kebijakan ini merekomendasikan empat strategi berikut yang dapat ditempuh Pemprov Jabar melalui penyusunan kebijakan berbasis perspektif anak.

- Tingkatkan kinerja FAD dengan melibatkannya dalam proses penyusunan kebijakan.
- Tingkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah, aktor nonpemerintah, keluarga/orang tua, serta masyarakat umum terkait hak anak.
- Adakan survei berorientasi anak secara berkala sebagai basis kebijakan.
- Optimalkan kolaborasi dengan aktor nonpemerintah dalam pengarusutamaan kebijakan anak.

LATAR BELAKANG

Pentingnya Penilaian Kesejahteraan Anak secara Holistik

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada 1990, Indonesia perlu terus memperkuat komitmennya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas mengenai masalah yang memengaruhi kehidupan mereka. Mendengarkan suara anak, terutama dalam upaya merumuskan kebijakan terkait anak, berarti bahwa negara mengedepankan kepentingan mereka, sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

Kesejahteraan anak sering kali dinilai dari sudut pandang orang dewasa, yakni dengan menggunakan indikator objektif yang dikumpulkan melalui survei berbasis rumah tangga dengan responden kepala keluarga atau orang dewasa, padahal anak-anak memiliki penilaian dan pandangan sendiri tentang kesejahteraan mereka. Kesejahteraan menurut pendapat atau sudut pandang anak inilah yang disebut kesejahteraan subjektif anak. Pandangan subjektif atau suara anak ini perlu didengarkan oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak secara holistik.

Kesejahteraan subjektif anak merupakan istilah dan konsep yang masih baru di Indonesia. Mengukur kesejahteraan subjektif anak berarti mempertimbangkan perspektif anak mengenai cara mereka melihat pengalaman hidupnya terkait kesejahteraan ataupun kebahagiaan mereka. Pengalaman setiap anak bervariasi sehingga penilaian dan pemaknaan mereka akan kesejahteraan dapat berbeda hasilnya dengan indikator kesejahteraan yang diukur secara objektif, misalnya dengan indikator kepemilikan materi/benda, kondisi rumah, dan lain-lain.

Gambaran Umum Kebahagiaan Anak di Jawa Barat

Pada 2017, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan UNICEF dalam kerja sama dengan Universitas Islam Bandung dan Pemprov Jabar melakukan survei kesejahteraan subjektif, khususnya mengenai persepsi anak tentang kebahagiaan, yang dikenal dengan nama Survei Kebahagiaan Anak (SKA) di Jawa Barat.¹ Survei ini memotret kondisi kehidupan anak-anak usia 8, 10, dan 12 tahun terkait persepsi mereka mengenai kebahagiaan hidup mereka. Meskipun hasil survei ini secara umum menunjukkan bahwa anak-anak di Jawa Barat merasa sudah bahagia, ada sekitar 0,8% anak yang berada pada titik ekstrem rendah dalam tingkat kesejahteraan atau merasa sangat tidak bahagia. Jumlah ini setara dengan lebih dari 200.000 anak pada kelompok usia tersebut (BPS *et al.*, 2018: 31).

Anak-anak yang merasa sangat tidak bahagia tersebut memiliki karakteristik, antara lain, (i) tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, (ii) pernah dirundung, (iii) mengalami kekurangan dari segi materi, dan (iv) tinggal jauh dari sekolah (BPS *et al.*, 2018). Pengetahuan tentang karakteristik ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang menasar akar masalah. Selain itu, berdasarkan hasil SKA 2017, salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebahagiaan anak adalah adanya pengalaman bahwa mereka didengarkan dan dilibatkan oleh orang dewasa dalam mengambil keputusan (BPS *et al.*, 2018: 66). Hal ini mengindikasikan pentingnya pelibatan anak dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

"Jabar Juara" sebagai Upaya Melibatkan Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemprov Jabar, melalui rumusan visinya yang berbunyi "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", telah berupaya meningkatkan kebahagiaan anak melalui program-program² dan target-target yang menasar isu kesejahteraan batin dan pemenuhan hak anak, seperti rasa aman, kondisi bebas dari perundungan, dan hak untuk berpartisipasi. Pemprov Jabar memenuhi hak partisipasi anak dengan membentuk Forum Anak Daerah (FAD)³ sebagai wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. Melalui FAD, anak diikutsertakan dalam musrenbang agar mereka dapat menyampaikan masukan. Akan tetapi, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan agar lebih bermakna. Berdasarkan survei U-Report (2020), sebanyak 75% responden anak di Jawa Barat belum tahu tentang FAD ataupun musrenbang dan 94% belum pernah mengikuti forum-forum tersebut.

Keterlibatan anak dalam FAD dan musrenbang yang belum optimal menunjukkan perlunya upaya meningkatkan perumusan kebijakan yang didasarkan pada perspektif anak. Penelitian Alifia *et al.* (akan dipublikasikan) menemukan bahwa pendapat dan aspirasi anak sering kali tidak didengarkan dan tidak diintegrasikan secara signifikan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, demi meningkatkan kebahagiaan anak, diperlukan upaya konkret untuk membuat kebijakan yang berpusat pada anak dengan memberikan ruang bagi anak guna mengekspresikan pendapat tentang apa yang mereka butuhkan. **Catatan kebijakan ini merekomendasikan empat strategi yang dapat ditempuh Pemprov Jabar untuk meningkatkan kebahagiaan anak melalui penyusunan kebijakan berbasis perspektif anak.**

¹ SKA dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan sampel 22.000 anak usia 8, 10, dan 12 tahun yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta (baik sekolah umum maupun sekolah berbasis agama). Jumlah sampel ini representatif terhadap jumlah anak di Jawa Barat pada kelompok usia tersebut.

² Beberapa program Pemprov Jabar yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan anak adalah, antara lain, Setangkai (Sekolah Tanpa Gangguan Gawai), Ngabaso (*Ngabring ka Sakola* yang berarti "Bersama-sama ke Sekolah"), Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga), Jabar Cekas (Jabar Berani Cegah Tindak Kekerasan), Stopper Jabar (Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan), dan Stopan (Stop Perkawinan Anak).

³ Pada tingkat nasional, forum ini diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2000 dengan nama Forum Anak Nasional. Forum ini menjadi wadah bagi anak di seluruh Indonesia untuk berinteraksi dengan pemerintah. Sejauh ini, forum tersebut telah terbentuk hingga tingkat desa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi 1: Tingkatkan kinerja FAD dengan menjamin keterlibatan anak secara lebih signifikan dalam proses penyusunan kebijakan.

Penelitian SMERU di Jawa Barat (Alifia *et al.*, akan dipublikasikan) menemukan fakta: anak-anak merasa bahwa keterlibatan mereka dalam FAD dan musrenbang belum maksimal. Umpan balik yang memadai serta informasi atau penjelasan perlu diberikan kepada anak ketika mereka menyampaikan usulan/aspirasi dalam forum publik sehingga mereka merasa dihargai. Dengan demikian, anak akan tetap terinformasikan akan prosesnya dan mengetahui alasannya jika masukan mereka belum dapat diakomodasi.

Anak-anak dari kelompok marginal dan mereka yang membutuhkan perlindungan khusus⁴ jarang terlibat dalam FAD; walaupun terlibat, mereka cenderung pasif (Octarra, Iustitiani, dan Ajisukmo, 2022). Untuk meningkatkan efektivitas FAD dan partisipasi anak dengan lebih inklusif, Pemprov Jabar perlu memperluas promosi FAD melalui berbagai media sosial, sekolah, dan organisasi di desa, seperti karang taruna. Pemerintah desa/kelurahan juga dapat mendukung promosi tersebut dengan menampilkan poster atau pengumuman tentang FAD.

Pemprov Jabar juga dapat mengadakan musrenbang anak (musrena) dengan melibatkan peserta di luar anggota FAD. Berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam musrenbang mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Dengan demikian, diperlukan upaya penciptaan relasi yang seimbang agar anak merasa nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Partisipasi anak dalam forum publik haruslah signifikan dan memberdayakan anak dengan keterampilan hidup sehingga keterlibatan mereka dapat memberikan dampak nyata bagi perumusan kebijakan (Lansdown, 2018). Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan keterampilan dan kapasitas anak dalam berpendapat dengan memasukkan program pengembangan diri ke dalam kurikulum ataupun kegiatan

ekstrakurikuler sekolah. Dalam hal ini, pelatihan berbicara di depan umum dan informasi mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dimasukkan. Program-program ini dapat dimulai melalui FAD. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan program-program pengasuhan positif yang berfokus pada upaya untuk menghargai suara anak. Terkait hal ini, Lansdown (2018) menyatakan bahwa penting kiranya membangun kepercayaan diri dan kapasitas anak dalam budaya dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan partisipasi anak.

Rekomendasi 2: Tingkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah (pemda), aktor nonpemerintah, keluarga/orang tua, serta masyarakat umum terkait hak anak.

Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait hak anak harus memperhatikan prinsip-prinsip hak anak, yaitu mendengarkan suara anak, berlaku nondiskriminatif, serta mengutamakan kepentingan dan kelangsungan hidup anak. Dengan demikian, pemda dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih responsif dan inklusif terhadap hak dan kebutuhan anak. Aktor nonpemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat memberikan dukungan yang lebih terarah dan efektif untuk melindungi hak anak. Orang tua dan masyarakat umum dapat berperan dalam menghargai, memenuhi, dan melindungi hak anak dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan pembicara dari berbagai sektor, seperti psikolog anak, pendidik, dan pekerja sosial, dapat diselenggarakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan. Pemprov Jabar dapat membuat materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, seperti buku, brosur, video, dan konten digital. Pelatihan khusus bagi guru/calon guru dan tenaga kependidikan lainnya mengenai hak anak juga penting, termasuk pengintegrasian prinsip-prinsip hak anak, pendekatan partisipatif dalam pendidikan, dan komunikasi efektif dengan anak ke dalam kurikulum dan metode pengajaran.



Anak-anak memiliki pendapat dan aspirasi tersendiri tentang kehidupan mereka. Melibatkan anak dalam diskusi-diskusi yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan mereka akan membuat anak merasa lebih berdaya, dihargai, dan didengarkan.

Foto: Ricky Firmansyah/SMERU

⁴ anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, anak dengan disabilitas, dan anak yang terpapar kehidupan jalanan

Untuk memastikan koordinasi yang baik dan strategi kesejahteraan anak yang holistik dan terpadu, dapat dibentuk kelompok kerja dengan perwakilan dari bidang terkait dalam pemda, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial. Kelompok kerja ini bertugas merumuskan dan mengimplementasikan strategi kesejahteraan anak serta memastikan koordinasi yang baik antarsektor terkait.

Rekomendasi 3: Adakan survei periodik yang berorientasi kepada pemahaman akan perspektif dan kebutuhan anak sebagai basis perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program terkait anak.

Mempertimbangkan suara anak dalam penyusunan kebijakan dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk memosisikan anak bukan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan yang penting. Oleh karena itu, melakukan survei/penelitian dalam mendengarkan suara dan aspirasi anak secara berkala dapat membantu Pemprov Jabar menyusun kebijakan yang berbasis kebutuhan anak.

Studi lanjutan SMERU (Alifia *et al.*, akan dipublikasikan) menunjukkan bahwa, secara umum, para pembuat kebijakan di Jawa Barat memiliki ketertarikan untuk mereplikasi SKA. Temuan SKA menjadi refleksi dan evaluasi pemerintah atas berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan. Sebagai contoh, temuan SKA relevan untuk melihat sejauh mana anak merasa aman sebagai dampak kebijakan kabupaten/kota layak anak. Pada 2021 dan 2022, dilakukan kembali survei yang serupa dengan SKA 2017 untuk melihat kebahagiaan anak pada masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa skor pada 2021 dan 2022 lebih rendah daripada skor pada 2017. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SKA masih relevan untuk digunakan secara kontinu dan, jika diperlukan, dapat disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan daerah.

Selanjutnya, pengintegrasian SKA ke dalam proses perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi kebijakan terkait anak. Pemprov Jabar perlu mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada dan melihat celah untuk memasukkan SKA ke dalam tata kelola kebijakan tersebut dengan, misalnya, menambahkan indikator terkait kesejahteraan dari perspektif anak dalam pengukuran kinerja pelaksanaan pembangunan.

Rekomendasi 4: Optimalkan kolaborasi dengan aktor nonpemerintah dalam upaya mengarusutamakan perspektif anak dalam perumusan kebijakan terkait kesejahteraan subjektif anak.

Melibatkan aktor nonpemerintah penting untuk mendapatkan gambaran tentang keberagaman perspektif anak, pertukaran pengetahuan dan keahlian tambahan, serta akses ke sumber daya yang mendukung implementasi program. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan aktor nonpemerintah lainnya (akademisi, peneliti) dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mereplikasi program-program kesejahteraan anak. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan lebih relevan, efektif, dan berdampak positif bagi anak-anak.

Untuk melibatkan aktor nonpemerintah dalam proses perumusan kebijakan terkait kesejahteraan anak, pemda di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dapat mengadakan forum atau pertemuan khusus berkala dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi anak. Melalui forum ini, pendapat dan masukan aktor nonpemerintah dapat dijadikan kontribusi berharga dalam merumuskan kebijakan, termasuk pengukuran kesejahteraan anak berdasarkan perspektif mereka. ■

DAFTAR ACUAN

- Alifia, Ulfah, Made Anthony Iswara, R. Ricky Firmansyah, dan Maudita Dwi Anbarani (akan dipublikasikan) 'Engaging Voices, Illuminating Paths: Improving Government's Commitment to Children's Subjective Well-Being through Participatory Research and Policy Dialogue in West Java Province.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- BPS, Universitas Islam Bandung, Bappenas, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2018) 'Laporan Survei Kebahagiaan Anak: Provinsi Jawa Barat.' Laporan tidak dipublikasikan, Badan Pusat Statistik, Universitas Islam Bandung, Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Lansdown, Gerison (2018) 'Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation.' Kerangka Konseptual. New York: UNICEF <<https://www.unicef.org/media/59006/file>> [17 Mei 2023].
- Octarra, Harla Sara, Nilla Sari Dewi Iustitiani, dan Clara Ajisukmo (2022) 'Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat Indonesia.' Laporan. Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, UNICEF, dan Bappenas <<https://www.unicef.org/indonesia/media/13441/file/Analisis%20Situasi%20Partisipasi%20Anak%20dan%20Remaja%20serta%20Keterlibatan%20di%20Masyarakat%20Indonesia.pdf>> [17 Mei 2023].
- U-Report (2020) *Penguatan Partisipasi Remaja yang Bermakna* <<https://indonesia.ureport.in/opinion/4535/>> [5 Juni 2023].



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330 Indonesia

☎ 6221-3193 6336

☎ 6221-3193 0850

✉ smeru@smeru.or.id

🌐 smeru.or.id

📺 @SMERUInstitute

📍 The SMERU Research Institute

📱 @smeru.institute

The SMERU
Research Institute

Editor:
Gunardi Handoko

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2023 SMERU

Untuk catatan kebijakan
lainnya, silakan kunjungi
smeru.or.id



Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Saran sitasi:

Alifia, Ulfah, Made Anthony Iswara, dan R. Ricky Firmansyah (2023) 'Mendorong Penyusunan Kebijakan Berbasis Perspektif Anak untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Jawa Barat.' Catatan Kebijakan No. 2/Agu/2023. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:
<URL> [tanggal akses].